

Bank Kalsel Dukung Percepatan Akses Keuangan Daerah dan Nasional



<https://kalsel.antaranews.com/berita/220196/bank-kalsel-dukung-percepatan-akses-keuangan-daerah>

Bank Kalsel yang merupakan bank milik pemerintah daerah siap mendukung percepatan akses keuangan daerah dan nasional melalui ekosistem keuangan daerah (EKD) yang kini telah disiapkan oleh bank daerah tersebut.

Direktur Utama Bank Kalsel Agus Syabarrudin di Banjarmasin Jumat mengatakan, pihaknya telah menyiapkan ekosistem keuangan daerah (EKD) sebagai salah satu cara untuk mendukung percepatan akses keuangan daerah sebagaimana diamanahkan oleh pemerintah pusat. Agus yakin, EKD dapat menjadi salah satu solusi yang mampu memperkuat perekonomian di Kalimantan Selatan di masa pandemi kini hingga ke masa depan dan bisa membuat nadi perekonomian di Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan berdenyut lebih kencang sebagaimana yang diharapkan.

Menurut Agus, Bank Kalsel sebagai BPD sekaligus BUMD dapat menjadi salah satu motor penggerak perekonomian daerah melalui konsep EKD. Selain itu, pembiayaan yang disalurkan dan Bank Kalsel bisa menjadi lebih mandiri untuk pembangunan daerah. Dengan demikian BPD bisa membangkitkan perekonomian daerah sekaligus meringankan beban pemerintah pusat

terutama di masa pandemi ini. Bukan tidak mungkin, konsep EKD yang diinisiasi bisa juga diterapkan di daerah lain.

Konsep ini telah disetujui oleh Pemprov Kalsel yang disisipkan dalam Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan. Tentang optimalisasi penerimaan pendapatan daerah dan draft-nya, kata dia, juga telah disampaikan ke Kemendagri untuk dikaji lebih dalam dengan harapan konsep EKD ini dapat segera terealisasi.

Konsep EKD yang diinisiasi oleh Agus Syabarrudin ini, diharapkan dapat memberikan benefit bagi masyarakat luas yang terlibat langsung maupun tidak langsung, berbagai benefit dapat diraih diantaranya, bagi pemerintah daerah yaitu:

1. Ekosistem keuangan daerah dapat mendukung penatakelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan transparan.
2. Baik secara langsung maupun tidak langsung dapat memperbesar kebermanfaatan keuangan daerah bagi daerah, baik dalam bentuk pengembalian berupa pendapatan daerah yang lebih besar maupun belanja daerah yang lebih efisien.
3. Pemantauan dan monitoring keuangan daerah yang lebih teratur dan tertata mempermudah dalam pelaksanaan pengawasan keuangan daerah.
4. Memperbesar penerimaan pendapatan daerah dari peningkatan bisnis Lembaga Jasa Keuangan Daerah maupun Badan Usaha Milik Daerah lainnya.
5. Mendatangkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat daerah dengan lebih besarnya kesempatan untuk terlibat dalam lingkup ekosistem keuangan daerah.

Sedangkan bagi lembaga keuangan daerah pengelola ekosistem keuangan daerah antara lain:

1. Memperbesar potensi bisnis Lembaga Jasa Keuangan Daerah dengan memanfaatkan jasa dan layanan yang dimiliki.
2. Memperluas pasar lembaga keuangan daerah melalui hubungan kemitraan dengan semua pihak di dalam ekosistem keuangan daerah.
3. Meningkatkan kemampuan Lembaga Jasa Keuangan Daerah dalam menghasilkan pendapatan yang mendorong penerimaan daerah.
4. Memperkecil risiko yang dihadapi dengan penyebaran dan bervariasinya pihak-pihak yang terlibat serta terdapatnya dukungan dari Pemerintah Daerah didalamnya.
5. Memperbesar rasa kepemilikan kepada Lembaga Jasa Keuangan Daerah dari semua pihak serta masyarakat.

Selain itu, bagi penyedia barang/jasa atau pihak ketiga lainnya:

1. Kepastian akan pelaksanaan pekerjaan dan penerimaan pendapatan yang lebih teratur, tepat waktu dan tepat kuantitas.
2. Peningkatan efisiensi dalam pelaksanaan dan pengelolaan bisnis.
3. Penerimaan insentif-insentif dalam bentuk tertentu yang dapat memberikan manfaat bagi Penyedia Barang/Jasa Dan Pihak Ketiga Lainnya untuk menjalankan bisnisnya.
4. Memperbesar pasar dari bisnis yang dijalankan dengan adanya keterlibatan dari semua pihak yang terkait.
5. Mendorong peningkatan bisnis serta memperbesar kemampuan untuk menghasilkan pendapatan dari pihak Penyedia Barang/Jasa Dan Pihak Ketiga Lainnya.

Sumber Berita:

1. <https://republika.co.id>, Diminta Jokowi, Bank Kalsel Percepat Akses Keuangan Daerah.
2. <https://kalsel.antaranews.com>, Bank Kalsel dukung percepatan akses keuangan daerah dan nasional.

Catatan:

Bank Kalsel

PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan atau yang dikenal dengan Bank Kalsel adalah sebuah bank yang berdiri pada 1964. PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan adalah Bank milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota Seluruh Kalimantan Selatan dan didirikan pada tanggal 25 Maret 1964 atas dasar Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 4 tahun 1964, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah dengan modal dasar sebesar Rp100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah) serta memperoleh izin usaha dari Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 26/UBS/65 tanggal 31 Maret 1965.

Seiring perjalanan waktu, guna penyesuaian terhadap berbagai perubahan yang terjadi, telah dilakukan beberapa kali pergantian Peraturan Daerah. Saat ini landasan hukum yang mengatur pendirian Bank BPD Kalsel adalah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Nomor 11 Tahun 2008, di mana modal dasar Bank ditetapkan sebesar Rp500.000.000.000,- (Lima Ratus Miliar Rupiah).

Industri perbankan adalah industri yang bergerak dengan sangat dinamis. Segala sesuatunya berjalan begitu cepat. Volume bisnis dan kompleksitas usaha makin meningkat. Persaingan tambah kompetitif. Nasabah semakin kritis sekaligus cerdas dan *aware*. Produk dan jasa layanan baru terus bermunculan. Maka, menjadi suatu keharusan untuk selalu *up-to-date* terhadap perkembangan dunia luar.

Hal itulah yang mendasari terjadinya perubahan di Bank BPD Kalsel. Perubahan yang dikemas dalam *grand design* yang disebut *rebranding*. *Rebranding* pada dasarnya merupakan upaya yang sistematis untuk membangun dan menampilkan citra baru di mata *stakeholders*, melalui perubahan *corporate identity*, cara berkomunikasi, hingga perilaku dan budaya kerja. Output-nya adalah *new identity*, *new image*, dan *new behaviour*.

Corporate identity adalah gambaran utuh mengenai sosok kepribadian, lingkup dan sifat kegiatan, serta aspirasi *stakeholders* dalam rangka pencitraan Bank Kalsel. Melalui *corporate identity* baru, secara internal diharapkan dapat menumbuhkan semangat perubahan kinerja ke arah yang lebih baik, menimbulkan rasa percaya diri dan kebanggaan, serta meningkatkan loyalitas seluruh karyawan terhadap Bank Kalsel. Secara eksternal, perubahan tersebut didedikasikan sebagai penanda atas komitmen Bank Kalsel untuk melayani masyarakat dengan lebih profesional.

Perubahan logo sebagai bagian dari *corporate identity* merupakan *starting point* dari program *rebranding*. Perubahan logo menjadi sangat penting dan strategis mengingat logo yang ada telah berusia puluhan tahun dan tinggal 3 Bank Pembangunan Daerah (BPD) se Indonesia yang masih memakai logo serupa. Selain itu, logo dimaksud adalah hasil penyeragaman dari seluruh BPD di Indonesia, sehingga kurang mencerminkan karakteristik dan identitas daerah Kalimantan Selatan.

Logo baru diharapkan mampu menyampaikan citra baru Bank BPD Kalsel. Citra yang berisi cita-cita dan harapan baru menuju regional *champion* yang eksis dan mampu bersaing dalam industri perbankan nasional. Citra sebagai bank terkemuka, modern, ramah dengan jangkauan regional hingga nasional, tanpa meninggalkan aspek-aspek *local content* yang positif serta memiliki nilai dan ciri khas tersendiri.